

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Palengaan Laok, yang berlokasi di Jalan Raya Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan

B. Jenis Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan maka, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengetahui secara mendalam dan memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat melalui Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk mencari dan menggali informasi mendalam suatu kasus/peristiwa yang terjadi dengan menempatkan teori pada data yang diperolehnya.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan Tim Pelaksana Keuangan Desa pada Desa Palengaan Laok. Data yang diperoleh adalah data yang terkait tentang pengelolaan keuangan desa berupa pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor pendukung

dan penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Dimana data yang diperoleh terkait pengelolaan keuangan desa terdapat tahap-tahap yang telah diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Tahap-tahap pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap penatausahaan
- d. Tahap pelaporan
- e. Tahap pertanggungjawaban

2. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa dokumen:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), Desa Palengaan Laok tahun 2016
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016-2022
- c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2016
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016
- e. Berita acara / daftar hadir MUSRENBANG Desa Palengaan Laok tahun 2016
- f. Rekening Kas Desa Palengaan Laok
- g. Peraturan Desa Palengaan Laok tahun 2016
- h. Profil Desa Palengaan Laok tahun 2016
- i. dan data lainnya yang terkait

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, untuk data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sedangkan data skunder diperoleh dari hasil dokumentasi dari setiap dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara kepada responden (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan pihak-pihak yang terkait lainnya) mengenai implementasi kebijakan APBDesa, yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam berguna sebagai pemeriksaan kembali, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat tercatat oleh pewawancara.

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen terkait anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di Kantor Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, berupa laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan dokumen yang terkait lainnya yang tercantum dalam data sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa, di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Menganalisis data terhadap implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa pada Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi lima tahap, yaitu:

a. Menganalisis tahap perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

b. Menganalisis tahap pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa serta di sahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

c. Menganalisis tahap penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Menganalisis tahap pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 3) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Menganalisis tahap pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - 4) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 5) Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
 - 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), untuk meningkatkan pembangunan desa, pada Desa Palengaan Laok.
 3. Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), untuk meningkatkan pembangunan desa, pada Desa Palengaan Laok